



ALAMTARA.JSI by IAI TABAH is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

Naskah masuk	Direvisi	Diterima	Diterbitkan
03-Juni-2023	07-Juni-2023	10-Juni-2023	30-Juni-2023
DOI : https://doi.org/10.58518/alamtara.v7i1.1772			

POLITIK SEBAGAI GAYA HIDUP

Sutikno

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Indonesia

E-mail: Caksutikno3@gmail.com

Abstrak: Artikel ini berfokus pada politik sebagai gaya hidup dalam budaya kontemporer dan gelombang demokrasi liberal. Praktik politik sebagai gaya hidup ini mencerminkan revolusi globalisasi dari dunia maya dan budaya postmodern dalam landasan ideologis kapitalisme akhir. Praktik politik gaya hidup juga mendegradasi narasi besar politik dalam modernitas politik yang mengorientasikan tatanan politik dan prinsip-prinsip demokrasi rakyat dan mengubah narasi kecil politik dalam postmodernitas politik yang mengorientasikan kesadaran subjek secara absolut yang dikendalikan oleh hasrat dan insting. struktur kesadaran materialistik, hedonistik, konkumeristik dan konsumtivistik. Politik sebagai gaya hidup hadir dalam kehidupan sehari-hari baik di ranah publik maupun digital. Politik sebagai gaya hidup menggambarkan kontestasi, presentasi, pertunjukan dan simulasi yang akhirnya menjadi masyarakat dalam kondisi mayoritas diam. Politik sebagai gaya hidup harus direkonstruksi yang berorientasi pada makna sebagai manusia otentis secara rasional dan transendental.

Kata Kunci: politik, gaya hidup.

Abstract: Abstract: This article focuses on politic as life-style in the contemporary culture and wave of liberal democracy. This political practice as life-style reflects globalization revolution from cyberspace and postmodern culture in the ideological foundation of late capitalism. The political practice of life-style also degrades political grand narrative in the political modernity which to orientates political order and the principles of peoples democracy and to changes political small narrative in the political postmodernity which to orientates absolutely subject consciousness whose controlled by desire and insting in the structure of materialistic, hedonistic, concumeristic dan konsumtivistic consciousness. Politic as life-style presents in every day life both in public or digital spheres. Politic as life-style describes contestation, presentation, performance dan simulation that finally becomes peoples in the majority condition of silence. Politic as life-style has tobe reconstructed which to orientates in meaning as otentical human rationally and trancendentally.

Keywords: politic, life-style.



PENDAHULUAN

Perkembangan politik kontemporer dalam negara hukum dan demokratis melahirkan berbagai fenomena baru yang di samping masih menggambarkan model pemikiran dan praktek politik konvensional dan formal juga model politik yang melampaui batas-batas konvensionalitas dan formalitas. Pemikiran dan praktek politik konvensional dan formal berpijak dari konsistensi narasi besar modernitas (*grand naration*) sementara politik yang melampaui formalitas dan konvensionalitas berpijak atas narasi-narasi kecil tersebut.¹ Jika narasi besar menggambarkan potret modernitas politik (*political modernity*) maka narasi-narasi kecil merupakan potret posmodernitas politik (*political postmodernity*) dan terutama poststrukturalis politik.² Hubungan dua model narasi ini dapat bersifat integratif sekaligus konfrontatif dan kontradiktif.

Potret modernitas politik yang berpijak atas narasi agung dalam negara hukum demokratis di Indonesia memuat asas ketertiban dan keteraturan (*political order*) dalam mewujudkan nilai-nilai kedaulatan, kesejahteraan, keadilan, musyawarah mufakat demi kebaikan rakyat secara kolektif.³ Fungsi dan peran tiga lembaga yang disebut trias politica adalah mewujudkan asas dan prinsip tersebut. Sementara organisasi masyarakat sipil (*civil society organizations*) menjadi kekuatan kelas menengah yang berperan dialektis dan dialogis antara negara dengan rakyat sebagai kelas bawah.⁴ Namun doktrin dan prinsip serta nilai-nilai dalam trias

¹ Modernitas politik (*political modernity*) merupakan pemikiran dan praktek politik yang berpijak dari filsafat politik modern sejak lahirnya periode pencerahan di Eropa Barat. Modernitas politik menjunjung rasionalitas dan idealitas yang merefleksikan kemenangan akal budi manusia. Prinsip dan nilai-nilai modernitas politik tentang kedaulatan rakyat, demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan sebagainya merupakan narasi agung sebagai fondasi dan orientasi pemikiran dan perilaku politik di atas. Pemikiran dan perilaku politik yang berpijak atas narasi agung ini dinilai dan diposisikan sebagai politik konvensional dan formal yang merefleksikan karakteristik modernisme dan modernitas itu sendiri. Kehadiran posmodernitas dan juga poststrukturalisme politik yang merefleksikan apatisisme dan pesimisme sekaligus optimisme atas modernitas politik menjadi landasan lahirnya pemikiran politik posmodern yang tidak lagi berpijak pada narasi agung modernitas yang bersifat formal dan konvensional namun melampaui keduanya. Pergulatan filsafat politik modern dengan posmodern dan juga pos-strukturalisme atau pergulatan narasi besar yang disebut metanarasi dengan narasi-narasi kecil ini merupakan fenomena sebagaimana dalam tradisi filsafat pada umumnya. Untuk diskusi lebih jauh masalah ini, lihat, Jean Francois Lyotard, *The Postmodern Condition*. Trans. George Bennington and B. Massumi (Manchester: Manchester University Press, 1984),

²Lihat, Saul Newman, *Power and Politics in Poststructuralist Thought: New Theories of the Political* (New York: Routledge, 2005).

³Tertib politik (*political order*) merupakan konsep politik yang berpijak atas narasi agung modernitas yang pernah menjadi orientasi politik di dunia ketiga, khususnya di Indonesia masa Orde-Baru. Manifestasi tertib politik ini tidak hanya bersifat institusional struktural namun juga sosial dan kultural. Untuk memperkuat orientasi ini maka diperlukan aturan hukum di segala aspek yang diperankan oleh kekuatan militer secara represif dan opresif. Namun tertib politik ini, sebagaimana ditegaskan Fukuyama, juga menghadapi dinamika yang mengarah pada pembusukan politik dalam arus globalisasasi. Lihat, Sammuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies* (New Haven: Yale University Press, 1968)., Francis Fukuyama, *Political Order and Political Decay. From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy* (New York: Macmillan, tt).

⁴Organisasi masyarakat sipil (*civil society organizations*) yang disebut pula dengan LSM atau organisasi non-pemerintah (*Non-Governmental Organizations*) memuat fungsi dan peran ideal



politica bagi negara hukum dan demokratis di atas mulai mengalami tragedi dan bahkan katastrop.

Kehadiran narasi-narasi kecil sebagai perlawanan atau bahkan kontinuitas atas narasi besar di atas merupakan faktor lahirnya tragedi dan katastrop. Korupsi, manipulasi, eksploitasi dan lainnya baik secara tampak maupun laten di tiga institusi negara, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif, baik di pusat maupun daerah, merefleksikan bahwa trias politica sebagai narasi besar dalam paradigma politik modern tidak bisa dipertahankan lagi. Reformasi politik merupakan upaya pembaruan politik terhadap tiga institusi tersebut guna menghindari tragedi dan katastrop politik. Proses perjalanan politik di Indonesia pasca reformasi telah memperlihatkan keberhasilan dalam mempertahankan asas trias politica tanpa terjadi revolusi politik berdarah sebagaimana di kawasan lain. Namun keberhasilan ini juga problematis di mana pencapaian konsensus politik yang sejalan dengan visi reformasi antara rakyat dan negara serta organisasi masyarakat sipil membuka ruang bagi kapitalisme dan neoliberalisme politik melalui demokrasi liberal.⁵

Dalam demokrasi liberal, terjadi pembauran antara tiga institusi negara dengan kekuatan kelas menengah. Pembauran ini tidak hanya bersifat presentatif dan representatif namun akibat kehendak kuasa (*will to power*)⁶ sehingga mengaburkan batas-batas struktural, formalitas dan konvensionalitas. Pembauran ini mengaburkan batas-batas pemikiran dan praktek politik modern dan posmodern atau pos-strukturalisme yang juga berdampak pada pembiasaan antara ketertiban dan kekacauan (*order and chaos*). Pola ketertiban dan kekacauan ini terjadi baik secara tampak maupun laten yang melahirkan disrupsi dan anomali politik.

Penetrasi posmodernitas politik dan atau politik posmodern dalam bingkai demokrasi liberal juga membuka ruang-ruang baru yang mempertegas pembiasaan dan pembauran di atas. Dalam posmodernitas politik dan politik posmodern, praktek politik dan kekuasaan telah melampaui batas-batas struktur formalitas dan

dalam negara hukum demokratis serta menjadi bagian dari pilar demokrasi itu sendiri. Meski demikian, dinamika proses demokratis menggambarkan fungsi dan peran kalangan ini tidak lepas dari kontinuitas dan pergeseran. Meski secara normatif menjadi pilar demokrasi dan secara ideal berada di antara rakyat dan negara namun pergeseran kalangan ini berubah menjadi kekuatan neoliberalis dan pragmatis. Untuk diskusi lebih jauh, lihat, Peter John, *Local Governance in Western Europe* (London: Sage Publications, 2001), 2., Adam Przeworski, *Sustainable Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 53., Farhan Bulkin "Pokok-pokok Pikiran Mengenai Kelas Menengah" makalah yang disampaikan pada PAIS (Percakapan Ahli Ilmu-ilmu Sosial) di Fisip-Universitas Indonesia pada 3-4 Oktober 1984., Lengwe Katembula "Participation of NGO in Social Development Process in Africa" a paper presented in Colloquium at The School of Social Work, University of Zimbabwe, 4 August 1994., Bob Sugeng Hadiwinata "Civil Society: Pembangun dan Sekaligus Perusak Demokrasi" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, No. 1. Vol. 9. Tahun 2005, 1-7., Bob Sugeng Hadiwinata, *Politics of NGO in Indonesia* (Routledge: Curzon Research on Southeast Asia;3, 2003), 90-93.

⁵Mark Jensen, *Civil Society in Liberal Democracy* (New York: Routledge, 2011), 27-28.

⁶Kehendak kuasa (*will to power*) merupakan istilah dan konsep yang digagas Foucault yang merefleksikan dimensi kesadaran laten dalam diri manusia. Kehendak kuasa ini hadir di segala ruang dan waktu serta melampaui batas-batas struktural konvensional dan formal. Lihat, Wendy Brown "Power After Foucault" dalam John S. Dryzek, Bonnie Honig and Anne Phillips, ed, *The Oxford Handbook of Political Theory* (Oxford: Oxford University Press, 2006), 65-67.



konvensionalitas. Lebih jauh, pembiasaan dan pembauran ini juga menjadikan politik sebagai gaya hidup (*politics as life-style*) di mana otoritas dan kapasitas struktural dalam sistem negara hukum demokratis memburu dan membias ke dalam praktek gaya hidup kapitalisme lanjut (*late capitalism*) dan budaya posmodern.⁷ Selebrasi politik dan selebritisasi diri tidak hanya terjadi dalam ruang dan medan politik formal dan konvensional namun juga menembus ke dalam arena-arena sosial dan kultural serta keagamaan.⁸ Kehadiran cyber-space sebagai potret kemajuan teknologi globalisasi media berkontribusi besar dalam mempresentasikan praktek politik gaya hidup dengan memposisikan rakyat atau masyarakat sebagai sistem obyek tontonan (*society of spectacles*).⁹ Kondisi tuna kuasa (*powerless condition*) dalam disrupsi dan anomali demokrasi akibat pola pembauran dan pembiasaan dengan berbagai derivasinya menjadikan rakyat berada dalam bayang-bayang mayoritas diam (*in the shadow of silent majorities*).¹⁰

Tulisan ini memfokuskan pada pergeseran sekaligus pembauran politik era modern dan posmodern di mana gaya hidup menjadi unsur modus eksistensi melalui praktek dan perilaku politik yang melampaui batas-batas konvensionalitas dan formalitas. Topik politik sebagai gaya hidup ini menggunakan perspektif paradigma kritis yang dikonstruksi dari penelitian kepustakaan (*library research*). Di samping itu, topik tentang politik sebagai gaya hidup belum banyak berkembang baik dalam tradisi ilmu politik kontemporer dan filsafat politik maupun komunikasi dan sosiologi politik. Tulisan ini dengan sendirinya bertujuan mengisi kekosongan diskursus politik posmodern atau posmodernisme politik yang sejalan dengan realitas dan fenomena kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Politik dan Gaya Hidup

⁷Ben Fine, *The World of Consumption: The Material and Cultural Revisited* (New York and London: Routledge, 2002), 156-159., Leslie Paul Thiele, *Thinking Politics: Perspective in Ancient, Modern and Postmodern Political Theory* (New York: Seven Bridges Press, 2002), 77-78.

⁸Selebrasi dan selebritisasi politik dalam ruang merefleksikan praktek interaksi dan komunikasi politik di dunia fisik sekaligus digital virtual. Praktek selebrasi dan selebritisasi merupakan bagian dari konstruksi manajemen kesan di hadapan khalayak yang secara otomatis memuat persuasi sekaligus afiliasi. Selebrasi dan selebritisasi, dengan demikian, merupakan bagian dari praktek dramaturgi politik sebagai perilaku politik kaum elit baik lokal maupun nasional. Untuk diskusi lebih jauh, lihat, Sutikno, *Komunikasi Politik Ulama: Studi Dramaturgi Politik dalam Pilkada* (Surabaya: Tesis Master Komunikasi, Universitas Dokter Sutomo, 2009)., Sufyanto, *Selebritisasi Politik: Kajian Dramaturgi, Habitus dan Tindakan Komunikatif Aktor Pemilu* (Bandung: Nusa Media, 2015)., Nyarwi Ahmad, *Manajemen Komunikasi Politik dan Marketing Politik: Sejarah, Perspektif dan Perkembangan Riset* (Yogyakarta: Pustaka Zaman, 2012), 55-56.

⁹Guy Debord, *The Society of the Spectacle*, terj. Ken Knabb (Berkeley: Bureau of Public Secrets, 2014).

¹⁰Posisi rakyat dalam bayang-bayang mayoritas diam ini tidak berbeda dengan potret budaya massa khususnya budaya opo yang dikonstruksi kaum elit borjuis terutama di dunia cyber-space yang di dalamnya terjadi manipulasi sistem tanda dan bahasa serta eksplosifitas dan implosifitas yang pada gilirannya melahirkan tirani semiotik dan hipersemiotik. Tirani ini menjadikan rakyat bersikap pasif dari pola persuasi dalam sistem tanda dan bahasa tersebut. Terdapat semacam sistem magnetik yang mengarahkan, mengatur dan mengendalikan kesadaran masyarakat dalam tirani tersebut. Lebih jauh, lihat, Jean Baudrillard, *In the Shadow of the Silent Majorities or the End of the Social and Other Essays*, terj. Paul Foss (New York: Columbia University Press, 1983).



Hubungan antara politik dan gaya hidup yang melahirkan gaya hidup politik atau politik gaya hidup memuat sejarah panjang bahkan sejak masa Yunani kuno. Politik sebagai arena hedonistik sebagai unsur gaya hidup menjadi pusat pemikiran Epicurisme.¹¹ Upaya pencapaian praktek hedonistik ini dinilai sebagai insting atau naluri dan hasrat manusia yang melandasi perjuangan pencapaian kekuasaan (*struggle for power*).¹² Pola pencapaian kekuasaan atas dasar hasrat dan insting atau naluri ini yang menempatkan manusia sebagai serigala yang satu memangsa yang lain.¹³ Insting dan naluri yang saling membunuh ini dinilai sebagai hukum alam (*state of nature*) yang mendasari perilaku dan praktek survivalistik.¹⁴ Kelahiran periode pencerahan sebagai esensi dan substansi modernisme Barat yang memuat visi agung yang disebut pula dengan narasi agung berorientasi humanisme antroposentrik dengan memaksimalkan akal budi dan mengubur insting dan naluri binatang di balik perjuangan kekuasaan.¹⁵ Di masa modern ini, akal budi menjadi ukuran segala sesuatu dan fondasi dalam membangun dan mengembangkan pemikiran dan praktek politik modern yang sejalan dengan akal budi tersebut. Dan dari proses ini maka muncul narasi agung modernitas dalam pemikiran dan praktek politik.

Meski demikian, modernitas politik sebagai narasi agung yang berorientasi humanisme antroposentris juga mengalami gugatan dan bahkan perlawanan. Dimensi keteraturan dan ketertiban yang dikonstruksi modernitas politik melalui sistem demokrasi mulai keluar dari jalur rasionalitasnya. Potret rasionalitas nilai yang diharapkan melandasi praktek demokrasi justru digantikan rasionalitas instrumental sebagai akar munculnya demokrasi liberal.¹⁶ Politik sebagai kebajikan kolektif yang demikian agung sejak masa Yunani dan bahkan periode Islam hingga kurun modern kehilangan elan vital berganti dengan yang politik. Hubungan politik (*politic*) dan yang politik (*political*) memuat potensi pembauran dan pembiasaan serta ketertiban dan kekacauan dari struktur nalar dan kesadaran

¹¹Hedonisme merupakan pandangan filosofis Epicurus bahwa tujuan utama hidup manusia adalah pencarian dan perburuan akan kenikmatan terutama kenikmatan raga yang disebut dengan istilah ataraxia. Potret hidup hedonistik ini hanya sebagai ide filosofis dari abstraksi realitas masyarakat Yunani Kuno masa itu. Sementara Epicurus sendiri punya pandangan ideal sebagai antitesis dari hedonisme ini. Lihat, Paul. A. Newberry, *Theories of Ethics* (London: Mayfield Publishing Co, 1999), 144., Franz Magnus Suseno, *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad Ke-19* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 64

¹²John Kane, *The Politics of Moral Capital* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 10.

¹³Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 171.

¹⁴Ibid.

¹⁵Namun kemenangan akal budi manusia ini dalam perkembangannya menimbulkan berbagai kompleksitas. Kompleksitas yang menggambarkan pelampiasan ambisi dan keserakahan ini tidak hanya terjadi di wilayah politik formal namun juga ke segala penjuru. Lihat, F. Budi Hardiman, *Humanisme dan Sesudahnya: Meninjau Ulang Gagasan Besar Tentang Manusia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), 1-2.

¹⁶William E. Sheurman, *Frankfurt School Perspectives on Globalization, Democracy and the Law* (London and New York: Routledge, 2008), 87-104.



manusia hingga perilaku dan praktek kolusif, koruptif dan manipulatif.¹⁷ Fenomena pergeseran modernitas politik berupa narasi agung menjadi posmodernitas politik berupa narasi-narasi kecil tidak hanya meruntuhkan sistem nilai universal namun juga melahirkan nilai partikular yang mempertegas krisis fondasionalitas itu sendiri.

Dimensi gaya hidup yang secara esensial dan substansial berada di luar politik dan demokrasi kemudian bergerak melampaui batas-batas struktur politik dan demokrasi itu sendiri.¹⁸ Dimensi gaya hidup yang dikonstruksi dari budaya posmodern dan kapitalisme lanjut dihadirkan kembali sebagai kontinuitas historis praktek hedonisme dari masa Yunani kuno. Meski demikian, pembauran dan pembiasan modernitas politik dan posmodernitas politik dalam arus demokrasi liberal, kapitalisme lanjut dan budaya posmodern menyangkut politik dan gaya hidup juga melahirkan optimisme baru bagi politik dan demokrasi itu sendiri. Posmodernitas politik yang melampaui formalitas dan konvensionalitas politik modern dinilai membuka ruang dan medan baru menyangkut relasi rakyat dan negara. Di sini politik dan demokrasi dapat hadir di segala arena dan medan sehingga keluar dari belenggu konvensionalitas dan formalitas politik demokratis. Fenomena ini mempertegas pola dekonstruksi narasi besar modernitas politik yang kemudian melahirkan nihilitas politik di mana politik hadir dan terjadi di segala

¹⁷Istilah politik (*politic*) dan yang politik (*political*) ini berangkat dari pandangan Althusser tentang filsafat dan ilmu dalam pemikiran Marxisme. Jika politik sebagai ilmu maka yang politik sebagai filsafat yang melampaui konvensionalitas dan formalitas ilmu itu sendiri. Dengan kata lain, politik sebagai ilmu memuat konvensionalitas, obyektifitas dan formalitas. Namun di dalam politik sebagai ilmu ini terdapat nuansa-nuansa filosofis yang terkadang membiaskan dan membaurkan antara politik dan yang politik. Manifestasi politik sebagai ilmu berupa formalisasi dan institusionalisasi dalam struktur kekuasaan terutama pemerintahan mempertegas dimensi politik itu sendiri. Namun di balik manifestasi tersebut kerap kali melahirkan nuansa-nuansa yang melampaui batas-batas formalitas dan institusionalitas yang mengaburkan dan membiaskan dimensi politik tersebut. Di Indonesia, fenomena ini tampak dari otoritas politik subyek yang membias dan membaur ke dalam otoritas-otoritas lain di luar institusi politik yang disebut dengan yang politik. Sementara pembiasan dan pembauran ini tidak hanya bersifat struktural dan institusional namun juga memuat sistem bahasa dan tanda sehingga menimbulkan silang sengkabut antara politik dengan yang politik. Lebih jauh, lihat, Louis Althusser, *For Marx* (London: Penguin Books, 1969), 22.

¹⁸Gaya hidup (*life style*) bukan sekedar menggambarkan konsep dan praktek hidup yang diproduksi dan direproduksi oleh sistem tradisi dan budaya secara antropologis semata. Kehadiran budaya pop yang berbeda dengan budaya populer merefleksikan potret gaya hidup yang diproduksi dan direproduksi oleh globalisasi kontemporer. Pembiasan dan pembauran budaya pop dan budaya populer ini menjadi unsur globalisasi yang disebut budaya posmodern. Praktek budaya posmodern dalam globalisasi ini tidak bisa hanya difahami sebagai serangkaian presentasi, presentasi, kontestasi simbol-simbol budaya dalam sosiologi tubuh namun memuat dimensi kesadaran bias ideologis khususnya kapitalisme lanjut. Dimensi gaya hidup bias ideologis ini berintegrasi ke dalam yang politik sebagaimana ditegaskan di atas. Pola integrasi ini menggambarkan bahwa praktek dan perilaku elit politik dalam ruang publik tidak hanya mempresentasikan formalitas dan konvensionalitas politik namun juga gaya hidup yang melampaui politik itu sendiri. Presentasi dan kontestasi gaya hidup secara simbolik ini secara fungsional dapat memperkuat praktek politik formal dan konvensional misalnya partisipasi dan konsolidasi politik namun dapat juga melahirkan persepsi publik yang merefleksikan borjuasi dan elitisasi politik tersebut. Untuk kajian lebih jauh, lihat, Rob Shields "Spaces for the Subject of Consumption" dalam Rob Shields, ed, *Lifestyle Shopping: The Subject of Consumption* (London and New York: Routledge, 1992), 1-6.



ruang dan waktu. Kehadiran yang politik di atas politik ini menjadikan politik demikian liar sehingga melakukan imperialisasi dan kolonialisasi ke segala aspek hidup manusia tanpa batas. Kolonialisasi dan imperialisasi yang politik ini juga merefleksikan pola perjuangan kuasa yang didominasi hasrat dan insting survivalistik melalui praktek korupsi, manipulasi dan instrumentalisasi segala sesuatu demi kelanggengan dan keamanan kuasa.

Politik gaya hidup merupakan potret dominasi yang politik (*political*) di mana hasrat dan insting survivalitas berselingkuh dengan demokrasi liberal, kapitalisme lanjut dan budaya posmodern. Demokrasi liberal merupakan potret demokrasi yang didominasi oleh ego atau subyek dalam bingkai nalar dan kesadaran instrumental, pragmatis dan manipulatif yang meski memuat visi transparansi dan partisipasi namun memuat orientasi akumulasi kapital. Kapitalisme lanjut yang berorientasi pada pelampiasan hasrat narsistik, anaklitik serta karnalistik dan banalistik menjadi fondasi dan orientasi kapitalisme politik dalam demokrasi liberal. Sementara budaya posmodern yang mencapai momentumnya dalam globalisasi kontemporer baik di jagad virtual dan digital maupun jagad fisik menjadi arena dan medan bagi ekspresi hasrat dan insting yang serba permisif dan melampaui batas-batas ketertiban dan keteraturan yang direpresentasikan etika dan moralitas.

Melampaui Demokrasi

Pembauran dan pembiasaan politik dan gaya hidup membuka ruang lebar bagi yang politik (*political*) melakukan penetrasi dan dominasi yang melampaui formalitas dan konvensionalitas demokrasi. Formalitas dan konvensionalitas demokrasi yang berpijak dari doktrin normatif tentang demos dan kratos yang bercorak humanisme antroposentris menempatkan rakyat dan derivasinya sebagai episentrum kesadaran politik. Namun kemunculan demokrasi liberal dalam globalisasi kapitalisme lanjut dan budaya posmodern meruntuhkan absolutitas dimensi kerakyatan, khususnya kedaulatan rakyat, berganti dengan kedaulatan pasar. Di samping memuat esensi dan substansi kedaulatan rakyat, demokrasi juga memuat praktek interaksi dan ruang publik dalam bingkai rakyat dan negara. Potret pergeseran menuju kedaulatan pasar menjadikan praktek interaksi atau komunikasi politik tidak lebih sebagai promosi dan transaksi semata. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan justru disubordinasikan sebagai komoditas yang ditransaksionalisasikan dalam setiap agenda demokrasi. Kelemahan literasi politik dan kedaulatannya menjadi faktor keberhasilan komodifikasi dan komoditisasi oleh elit di berbagai peristiwa politik.

Kapitalisme lanjut yang berorientasi gaya hidup menjadi unsur bagi transformasi demokrasi yang berpusat pada presentasi, simbolisasi, dramaturgi, performansi dan simulasi politik yang menempatkan rakyat sebagai penonton pasif. Potret politik pertunjukan akibat dominasi dari yang politik seolah menggambarkan dinamika ruang publik di mana antara rakyat dan elit negara berinteraksi secara kolektif. Padahal potret ruang publik ini lahir dari rekayasa struktural yang di dalamnya terjadi berbagai modus politik gaya hidup. Modus



politik gaya hidup ini dapat berupa konspirasi dalam ruang publik melalui penetrasi kesadaran kaum elit sosial dan kultural untuk mengabsahkan dan bahkan berimitasi secara kolektif dalam praktek gaya hidup.

Fenomena kemajuan ruang publik secara kuantitas mulai dari kafe hingga mall dipelosok desa hingga kawasan metropolis sesungguhnya memuat optimisme bagi kuantitas dan kualitas demokrasi. Ironisnya, kemajuan ruang publik tersebut hanya sebagai medan dan arena politik gaya hidup yang di dalamnya tidak ditemukan esensi dan substansi praktek komunikasi dan interaksi politik namun hanya berupa perilaku hedonistik yang merefleksikan kesadaran palsu (*false consciousness*) yang dikonstruksi kapitalisme lanjut. Budaya posmodern yang permisif dan dominasi kapitalisme lanjut melahirkan imajinasi kreatif bagi praktek demokrasi namun sesungguhnya memuat potensi destruktif. Esensi dan substansi demokrasi yang secara ideal dapat diartikulasikan dalam ruang publik tersebut justru berubah menjadi ritualitas hedonistik yang mengalihkan dari kesadaran otentik menuju kesadaran palsu.

Kemajuan teknologi globalisasi khususnya teknologi media menjadi sarana ekstensi kesadaran dan praktek politik sekaligus demokrasi palsu. Istilah hiperpolitik dan hiperdemokrasi dalam khazanah politik posmodern demikian populer untuk mempertegas bahwa jagad *cyber-space* yang dimediasi internet hanya menjadi arena dan medan konstruksi citra yang seolah mempresentasikan peristiwa politik dan demokrasi otentik namun sesungguhnya hanya kepalsuan. Konstruksi citra politik dan demokrasi di jagad *cyber-space* dalam globalisasi kontemporer justru menjadi fenomena lahirnya krisis komunikasi dan interaksi politik.¹⁹ Kepalsuan demokrasi yang semula berada dalam ruang publik fisik kemudian berubah menjadi ruang publik digital-virtual yang berorientasi pada citra semakin memperkuat modus kepalsuan itu sendiri. Degradasi demokrasi otentik menuju demokrasi artifisialistik ini tidak hanya dipresentasikan kaum elit negara namun juga menggambarkan pola konspirasi dengan kekuatan kelas menengah sebagai representasi rakyat di setiap hirarki kekuasaan politik.

Citra sebagai orientasi politik gaya hidup dan gaya politik yang berorientasi citra merupakan berhala-berhala politik baru yang dikonstruksi oleh globalisasi kapitalisme dan budaya posmodern melalui dunia digital dan virtual. Konstruksi citra sebagai orientasi politik dan kuasa melampaui esensi dan substansi demokrasi. Sebab konstruksi citra melalui modus interaksi dan komunikasi dalam bingkai industri media dan budaya telah mengaburkan esensi dan substansi demokrasi. Pengaburan ini terjadi dalam ruang publik fisik dan virtual-digital berikut

¹⁹Fenomena *mediamorfosis* dari dunia fisik menuju dunia *cyber-space* yang bersifat digital dan virtual secara ideal memperluas jangkauan praktek komunikasi dan interaksi politik. Namun fenomena *mediamorfosis* tidak selalu menggambarkan realitas ideal tersebut. Keluasan jangkauan dunia *cyber-space* sebagai media komunikasi dan interaksi politik juga menimbulkan berbagai distorsi. Di samping itu, keluasan jangkauan ini hanya didominasi oleh konstruksi citra daripada kehendak kolektif membangun kesamaan makna dalam dunia politik. Untuk diskusi lebih jauh, lihat, Roger Fidler, *Mediamorfosis: Memahami Media Baru*. Penj. Hartono H. (Yogyakarta: Benteng Budaya, 2003).



praktek komunikasi dan interaksi tanpa menyentuh unsur-unsur fundamental hidup masyarakat. Konstruksi citra hanya memuat jargon dan retorika yang dibingkai secara normatif, etis dan dramaturgis tanpa merubah situasi dan kondisi.²⁰

Keteraturan dan Kekacauan Kuasa

Fenomena politik dan demokrasi yang melampaui batas-batas formalitas dan konvensionalitas menampilkan konvergensi dengan politik sebagai gaya hidup yang di dalamnya hasrat dan insting kuasa berikut praktek-praktek hedonistik demi mengaburkan relasi rakyat dan negara menimbulkan kekacauan kuasa itu sendiri. Hasrat dan insting kuasa yang di masa modern diartikulasikan dalam sistem produksi di berbagai institusi formal dan konvensional baik bersifat sinergis maupun kontradiktif dengan sistem hukum di dalamnya secara umum merefleksikan bentuk keteraturan atau ketertiban politik. Demikian pula, praktek demokrasi konstitusional berupa diskursus praksis dan deliberatif berorientasi kesejahteraan secara obyektif juga merefleksikan realitas serupa.²¹

Imajinasi modernitas politik tentang keteraturan atau ketertiban politik di atas sesungguhnya merupakan fenomena yang berlaku di masa Orde-Baru. Sebagai rezim kuasa sekaligus penjaga dogma modernitas politik dan demokrasi yang berorientasi ketertiban dan keteraturan telah menampilkan keberhasilan. Meski demikian, orientasi normatif demokrasi dan politik Orde-Baru ini tidak diperkuat dengan kehendak dan kesadaran partisipatoris namun bersifat elitis. Potret politik dan demokrasi elitis ini yang meski menampilkan ketertiban sekaligus keteraturan sesungguhnya memuat potensi eksplosif dan implosif dengan lahirnya reformasi. Sebab politik dan demokrasi elitis hanya melahirkan kebekuan demokrasi (*frozen democracy*) demi kontinuitas kemapanan struktural.²²

Eksplisitas dan implisitas demokrasi di era reformasi menjadi momentum munculnya keteraturan dan kekacauan struktural, sosial dan kultural dalam konteks politik nasional dan lokal. Eksplisitas dan implisitas demokrasi merefleksikan dekonstruksi atas kebekuan modernitas politik dan demokrasi. Eksplisitas dan implisitas ini dipresentasikan para aktor baru melalui berbagai struktur narasi-narasi politik dan demokrasi yang bersifat partikularistik. Meski keberhasilan reformasi struktural politik dapat direkonstruksi di masa reformasi namun tidak mampu membendung arus struktur narasi-narasi partikular dan liar

²⁰Konstruksi citra merupakan bagian dari komunikasi politik yang bersifat interaksionis simbolik baik di dunia cyber-space maupun dunia fisik. Namun praktek komunikasi dan interaksi politik berupa konstruksi citra politik ini merupakan fase atau tahap awal yang disebut Habermas sebagai tindakan normatif dan dramaturgis. Sementara politik merefleksikan rasionalitas manusia yang hanya bisa dicapai melalui tindakan komunikatif dalam situasi ideal tanpa dominasi dan hegemoni. Lihat, Jurgen Habermas, *Teori Tindakan Komunikatif*, jilid 1. terj. Nurhadi. (Yogyakarta: Kreasi Wacana), 2007.

²¹F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), 45-49.

²²Kebekuan demokrasi merupakan fenomena yang tidak saja menggambarkan kelemahan tingkat partisipasi masyarakat berikut unsur-unsur institusional di dalamnya namun juga tindakan komunikatif partisipatoris antara elit dan masyarakat. Untuk diskusi lebih jauh, Lihat, Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah*. Pent. I. Made Krisna (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 221-223.



yang berpotensi melahirkan kekacauan struktural, sosial dan kultural. Potret kekacauan struktur narasi-narasi partikular dan liar tersebut juga menggambarkan model pertarungan sistem tanda dan bahasa di mana antara satu dengan lainnya saling melakukan kolonisasi dan imperialisasi. Kemajuan teknologi media dalam globalisasi politik dan demokrasi ini menjadi unsur fundamental lahirnya kekacauan antar struktur narasi yang dipresentasikan berbagai kekuatan politik, sosial dan kultural. Fenomena ini tidak bisa dinilai sebagai wujud peningkatan transparansi dan partisipasi politik namun juga memuat konsekuensi kekacauan politik dan demokrasi berupa pergulatan antar struktur narasi yang dipresentasikan berbagai aktor justru menimbulkan kekacauan yang tidak terkendali.

Potret pergulatan antar struktur narasi yang dipresentasikan berbagai aktor dalam memaksimalkan momentum transparansi dan partisipasi demokrasi tidak sekedar sebagai eksplorasi ide dan gagasan konstruktif bagi pengembangan politik dan demokrasi itu sendiri. Eksplorasi ide dan gagasan juga sebagai representasi pengetahuan dan kepentingan (*knowledge and interest*) dalam struktur kesadaran laten.²³ Pertautan pengetahuan dan kepentingan yang dipresentasikan berbagai struktur narasi yang partikularistik dan liar ini menjadi fenomena yang masih terus berangsur dalam periode kontemporer. Pertautan pengetahuan dan kepentingan merupakan keniscayaan dari partikularitas naratif dalam struktur politik dan demokrasi yang demikian cair. Pertautan pengetahuan dan kepentingan ini tidak hanya direpresentasikan oleh aktor-aktor politik formal dan konvensional. Lebih jauh, potret politik dan demokrasi yang menerjang dan melampaui batas-batas formalitas dan konvensionalitas membuka ruang selebarnya bagi berbagai aktor dengan ragam kepentingan yang berbeda-beda. Pola akomodasi berbagai kepentingan dari berbagai aktor ini merefleksikan bentuk kekacauan politik dan demokrasi karena keluar dari saluran formal dan konvensional. Akomodasi berbagai kepentingan ini pula membuka ruang dan arena baru bagi pelampiasan hasrat dan insting berbagai aktor dalam bingkai politik gaya hidup. Pelampiasan hasrat dan insting politik gaya hidup ini tidak hanya merefleksikan potret hedonisme dalam sejarah politik masa Yunani kuno namun juga membaur dengan ilusi kesadaran palsu dengan menjadikan institusi politik sebagai sumber dan

²³Pertautan pengetahuan dan kepentingan di wilayah politik ini berangkat dari ide Habermas dalam tradisi filsafat kritis yang berpijak dari pemikiran Kant tentang rasionalitas murni dan rasionalitas praksis dan instrumental. Di wilayah politik, pertautan dua unsur ini berkaitan dengan bagaimana praktek tindakan komunikatif antara rakyat dan negara. Politik tidak sekedar memuat tujuan dan orientasi ideal-normatif namun juga tentang subyek atau ego politik. Subyek atau ego politik menjadi episentrum pengetahuan dan kepentingan yang berakumulasi dalam struktur dan institusi kekuasaan. Akumulasi pengetahuan dan kepentingan dalam subyek atau ego politik ini menjadi unsur utama dalam menentukan formasi kebijakan publik yang bersifat transparan maupun sebaliknya sesuai dengan pertimbangan kepentingan politiknya. Lebih jauh diskusi tentang pertautan antara pengetahuan dan kepentingan di atas, lihat, F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif* (Yogyakarta: Kanisius), 1993., Sutikno, *Komunikasi Kritis: Rekonstruksi Demokrasi Politik di Indonesia* (Lamongan: Pustaka Ilalang, 2016).



sarana produksi demi akumulasi model yang dimotivasi kesadaran narsistik dan anaklitik serta karnalistik dan libidinalistik.²⁴

Pembauran dan kekacauan dalam potret politik sebagai gaya hidup yang dikonstruksi dari hasrat dan insting di atas tidak bisa difahami melalui perspektif struktural yang telah mengalami reformasi sedemikian rupa. Politik sebagai gaya hidup melampaui formalitas dan konvensionalitas struktural dalam dimensi keteraturan dan ketertiban namun dominasi hasrat dan insting dalam budaya posmodern dan kapitalisme lanjut di era demokrasi liberal mengakibatkan struktur formal dan konvensional ini sebagai sistem tanpa jiwa. Berbagai sistem struktural dalam bingkai modernitas politik dan demokrasi mengalami kematian akibat dominasi keliruan dan kekacauan hasrat dan naluri kuasa demi pelampiasan gaya hidup yang berpijak dari ego pragmatis dan instrumental. Fenomena ini tampak dari bagaimana setiap aktor politik dan demokrasi bukan dari institusi formal namun membuka ruang bagi aktor-aktor sosial, kultural dan bahkan keagamaan yang lepas dari bingkai struktur narasi formal dan konvensional.

Perselingkuhan struktur narasi-narasi yang melampaui batas formalitas dan konvensionalitas ini menjadi awal lahirnya kekacauan kuasa di balik ketertiban struktural. Perselingkuhan struktur narasi ini juga menjadi awal lahirnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan aktor-aktor nasional maupun global. Sementara KKN merupakan tradisi yang dikonstruksi dari modus permainan hasrat dan insting yang melampaui batas-batas kemanusiaan, peradaban dan keadaban. Potret tradisi KKN ini menjadi puncak kekacauan kuasa yang pada gilirannya dilampiaskan ke dalam modus gaya hidup bias kapitalistik, hedonistik, konsumeristik dan sebagainya. Potret gaya hidup yang dikonstruksi dari kekacauan politik dan demokrasi ini dengan sendirinya melahirkan kekacauan massa melalui sistem industri media dan budaya dalam era globalisasi kontemporer.

Kepenuhan dan kehampaan Kuasa

Pola pertarungan dan pergulatan antar struktur narasi dalam globalisasi kapitalisme, demokrasi liberal dan budaya posmodern yang melandasi praktek politik gaya hidup menggambarkan potret kepenuhan bahasa dan kuasa yang menimbulkan situasi kebisingan sekaligus kekacauan dalam budaya politik kontemporer. Konstruksi citra dalam kepalsuan ruang publik berikut narasi sloganistik dan retorik melahirkan kehampaan kuasa yang berimplikasi pada disrupsi dan anomali politik. Fenomena di atas tidak saja terjadi dalam struktur lembaga politik formal namun juga menyebar ke ranah sosial, kultural dan

²⁴Beberapa model kesadaran di atas menggambarkan pembauran dan pembiasan antara sadar dan ketidaksadaran dalam praktek gaya hidup di era kapitalisme lanjut. Beberapa model kesadaran ini dalam khazanah Kajian-kajian budaya (*cultural studies*) merefleksikan pandangan Marx dan Freud tentang kesadaran palsu kaum kapitalis serta kekacauan dimensi Id, Ego dan Superego dalam masyarakat kontemporer. Kemajuan teknologi globalisasi terutama cyber-space dan budaya posmodern dalam bingkai ideologis kapitalisme lanjut hanya sebagai arena ekspresi yang tidak substansial dan tidak esensial serta remeh temeh. Untuk kajian lebih jauh, lihat, Reuben Osborn, *Marxism and Psychoanalysis* (New York: Dell Publishing Co, 1965).



keagamaan. Eksplosifitas atas ketertiban dan keteraturan modernitas politik dan demokrasi menimbulkan situasi liar dan kacau tanpa terdapat suatu unsur yang dapat dan mampu mengendalikan situasi tersebut. Fenomena ini menggambarkan bahwa politik sebagai gaya hidup tidak berbeda dengan sirkuit di mana kompetisi, kontestasi, simulasi dan lainnya terjadi sedemikian rupa. Kebisingan politik tidak berbeda dengan kebisingan sirkuit di mana antara satu pihak dengan pihak lain saling menikam, menjatuhkan dan bahkan menghancurkan yang merefleksikan pandangan Hobbes bahwa manusia yang satu ibarat serigala bagi manusia yang lain.²⁵

Potret kebisingan politik dan konstruksi politik kebisingan ini menampilkan peningkatan intensitas di jagad digital dan virtual atau cyber-space yang sekaligus melahirkan kehampaan demokrasi politik dalam ruang publik fisik. Pola transmudasi menuju cyber-space dalam politik sebagai gaya hidup demikian intensif dan ekstensif di mana permainan antar struktur narasi yang bersifat kompetitif, simulatif dan lainnya terjadi sedemikian rupa. Dunia cyber-space yang dipenuhi data besar (*big data*) dijadikan sebagai sumber konstruksi narasi bahasa dan kuasa. Pola kontestasi, kompetisi dan simulasi yang liar dan kacau telah menerjang batas-batas peradaban dan keadaban demokratis politik. Kemunculan informasi palsu atau hoax menjadi kelaziman yang dibingkai sedemikian rupa untuk menjatuhkan dan menghancurkan lawan politik. Potret kebisingan antar struktur narasi berikut kekacauan dan keliaran yang menyertai serta kepalsuan narasi hanya sebagai representasi kuasa tertentu untuk menjatuhkan kuasa yang lain. Sementara formasi kuasa di jagad cyber-space hanya sebagai kehampaan karena tidak memuat esensi dan substansi progresif dan transformatif bagi kehidupan demokrasi dan politik itu sendiri.

Pola transmudasi politik dan kuasa ke dunia cyber-space juga melahirkan pembiasaan atau pembauran esensi dan substansi demokrasi fisik. Demokrasi digital (*digital democracy*) tidak bisa direduksi berupa praktek pemilu yang terbukti mengalami kegagalan di negara paling demokratis, yakni Amerika-Serikat.²⁶ Pola transmudasi yang mengorbankan demokrasi fisik menuju digital menjadikan sistem tersebut kehilangan arena dan medan penyemaian makna politik dan kuasa. Sementara makna demokrasi justru merupakan kunci bagi pengembangan keadaban dan peradaban politik yang berpusat pada kedaulatan rakyat. Pembajakan demokrasi digital atas demokrasi fisik merefleksikan mata rantai politik sebagai gaya hidup yang di dalamnya pertarungan antar struktur narasi dapat berubah menjadi perselingkuhan dan pengkhianatan demokrasi.

Modus citra politik yang mendominasi ruang publik digital tidak hanya memperlebar distansi ruang dan waktu dalam konteks relasi rakyat dan negara namun menyembunyikan esensi dan substansi demokrasi politik. Citra politik di jagad digital dan virtual tidak hanya mempertegas kebekuan sistem tanda dan

²⁵Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat...*, 171.

²⁶Untuk diskusi lebih jauh, lihat, Anthony G. Wilhelm, *Democracy in the Digital Age: Challenges to Political Life in Cyberspace* (New York: Routledge, 2000).



bahasa berikut kebisingan pertarungan antar struktur narasi di dalamnya namun juga kehampaan kuasa. Kehampaan kuasa dalam politik dan demokrasi digital-virtual di jagad cyber-space tidak berarti bahwa para aktor kehilangan otoritas dan kapasitas struktural. Kehampaan kuasa muncul dari pola pembiasaan dan pembauran yang melahirkan situasi disrupsi dan anomali dalam struktur nalar dan kesadaran rakyat.

Dalam Bayang-bayang Mayoritas Diam

Potret transmudasi demokrasi dan politik ke jagad cyber-space yang melahirkan hiperpolitik dan hiperdemokrasi dengan berbagai dinamikanya merupakan kontinuitas dari transformasi demokrasi dan politik di jagad fisik atau dunia real. Kontinuitas transmudasi praktek politik dan demokrasi ini tidak merubah unsur dan aspek bagi keharusan dan tuntutan rekonstruksi demokrasi politik yang berkualitas. Berbagai model dan modus praktek politik dan demokrasi di jagad fisik yang menjadikan dan memposisikan rakyat sebagai sistem obyek pertunjukan sehingga menjadi mayoritas diam juga terjadi hiperpolitik dan hiperdemokrasi. Meski istilah politik millennial menyertai praktek demokrasi politik dan politik demokratis melalui indikasi kepemilikan dan penguasaan teknologi informasi bukan kemudian secara otomatis menjadi daya tarik rakyat.

Jika pesimisme politik dan demokrasi merupakan fenonema umum di dunia real atau jagad fisik maka demikian pula terjadi di jagad digital dan virtual. Pesimisme politik tidak sekedar fenomena psikologis yang didasarkan atas praktek politik dan demokrasi yang elitis berikut pengabaian aspirasi publik. Pesimisme politik juga dapat muncul akibat situasi kebisingan politik di jagad digital dan virtual yang memperlihatkan silang sengkabut antar sistem tanda dan bahasa yang tidak bisa dirasionalisasikan secara logis. Pesimisme politik juga muncul dari kehampaan makna di balik berbagai citra politik berikut sistem tanda dan bahasa di dalamnya. Beberapa bentuk pesimisme politik ini diperkuat pula dengan tradisi KKN yang demikian kacau dan liar serta melampaui struktur formal dan konvensional. Praktek politik sebagai gaya hidup yang dikonstruksi dari unsur-unsur di atas semakin mengaburkan esensi dan substansi makna politik sebagai kebijakan kolektif dalam pengertian luas.²⁷

Dalam mayoritas diam yang dipresentasikan dan direpresentasikan rakyat berpengaruh bagi perkembangan demokrasi politik dan politik demokratis yang berpusat pada dialektika kuasa. Dialektika kuasa meniscayakan relasi rakyat dan negara melalui praktek diskursus dialogis dan deliberatif dalam membangun solusi dan resolusi di berbagai bidang. Transmudasi demokrasi dan politik ke dunia cyber-space yang meski memuat ruang publik dialektis namun tidak akan dapat berjalan maksimal. Transmudasi tersebut dapat juga merupakan pola pelarian elit politik demi mengabaikan dan menghindari nalar kritis publik. Lebih jauh, transmudasi

²⁷Politik sebagai kebijakan kolektif ini secara normatif merefleksikan pengertian politik di masa klasik terutama pemikiran Plato dan Aristoteles yang diharapkan terus berlangsung di era modern dan kontemporer. Pengertian politik normatif ini secara diskursif akademis masih menjadi landasan dalam rangka membangun kebaikan bersama yang merefleksikan kebijakan kolektif di atas. Lihat, Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2010), 30-41.



tersebut menjadi arena pergeseran dari tuntutan akuntabilitas politik menuju hedonitas politik. Krisis dialektika kuasa dalam negara demokratis yang dibuktikan dengan mayoritas diam dapat menimbulkan tirani politik sebagaimana rezim fasisme. Praktek fasisme dalam globalisasi kontemporer tidak hanya menjadikan pola transmudasi sebagai zona pengamanan politik namun juga memuat sistem kontrol dan pengawasan atas warga negara atau rakyat.²⁸ Politik kontrol dan pengawasan ini merupakan strategi pengamanan praktek gaya hidup dengan tetap membiarkan rakyat atau masyarakat sebagai mayoritas dalam diam. Dalam mayoritas diam ini, rakyat menjadi sistem obyek politik pertunjukan, politik simulasi, politik kontestasi, politik ilusi dan fantasi serta halusinasi yang dikonstruksi kaum elit.

Kondisi dalam mayoritas diam akibat koherensi aspek obyektif dan subyektif merupakan ancaman sekaligus tantangan besar politik demokratis yang tidak hanya berupa krisis dialektika dalam konteks relasi rakyat dan negara namun juga membuka ruang-ruang baru bagi praktek eksploitasi, manipulasi, dominasi dan hegemoni politik. Kondisi dalam mayoritas diam ini merefleksikan apa yang disebut sebagai akhir politik dan demokrasi. Fenomena akhir politik dan demokrasi ini mempertegas kemusnahan dan kesirnaan harapan sebagai karakteristik katastrof politik dan demokrasi. Kondisi dalam mayoritas diam juga melahirkan ilusi, fantasi, imajinasi dan halusinasi bagi masyarakat baik merefleksikan kenaifan rasionalitas maupun kenaifan spiritualitas. Dua model kenaifan ini secara historis digugat oleh Marx dengan istilah candu. Jika agama merupakan candu masyarakat karena agama menjadi arena kenaifan spiritual dalam kondisi mayoritas diam tanpa melakukan perlawanan yang dikenal dengan istilah revolusi.²⁹

Di samping model kenaifan di atas, kondisi mayoritas diam juga diwarnai dengan kenaifan oportunistis pragmatis melalui jaringan paternalisme dan feodalisme sebagai sistem budaya politik demokratis yang masih banyak terjadi di Indonesia. Perilaku oportunistis dan pragmatis dalam jaringan paternalistik dan feodalistik ini merefleksikan pelarian menuju zona keamanan dalam struktur kapitalisme dan neoliberalisme politik. Pencarian dan pelarian menuju zona aman dalam kondisi mayoritas diam mempertegas potensi rasionalitas pragmatis dan instrumental yang berintegrasi dengan elit kuasa. Pola integrasi ini tidak hanya menjadikan sebagian rakyat sebagai sumber legitimasi politik demokratis namun juga menjadi bagian subordinasi yang turut merasakan dan menikmati berbagai hasil dari kapitalisme politik dalam bingkai hedonisme dan lainnya.

Pencarian Makna dalam Kuasa

Modus kuasa dalam politik dan demokrasi yang melampaui batas-batas formalitas dan konvensionalitas sekaligus pembauran ketertiban dan kekacauan demi pemenuhan gaya hidup yang dipresentasikan subyektif atau ego pragmatis dan

²⁸Lihat, Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for A Human Future at the New Frontier of Power* (New York: Hachette Book Group, 2019).

²⁹Lihat, Andrew M. McKinnon "Opium as Dialectics of Religion: Metaphor, Expression and Protest", dalam *Critical Sociology Journal*, No. 1/2. Vol. 31., 15-38.



instrumentalistik berikut derivasinya mempertegas hakekat manusia sebagai binatang politik (*zoon politicon*) yang berputar dalam labirin kekuasaan. Sementara hidup berputar dalam labirin politik gaya hidup tidak saja menimbulkan disrupsi dan anomali namun juga krisis eksistensial berupa kehampaan makna hidup di balik praktek kuasa yang melampaui fondasionalitas, formalitas dan konvensionalitas politik demokratis tersebut. Potret perjalanan reformasi selama lebih dari dua dasawarsa mempertegas fenomena di atas di mana tradisi KKN sebagai derivasi politik sebagai gaya hidup harus berhadapan dengan sistem hukum yang masih menjunjung harkat dan martabat kemanusiaan.

Dari proses hukum tersebut di satu sisi terjadi rekonstruksi kesadaran atas ego instrumentalistik dan pragmatis berbagai kalangan mulai dari kyai, guru, politisi, pengusaha dan lainnya sementara di sisi lain justru memperkuat tradisi tersebut dengan menjadikan hukum sebagai sistem obyek transaksional dan instrumental. Hukum sebagai sistem obyek ini tidak hanya melalui kekuatan struktural dan fungsional politik namun juga meruntuhkan harkat dan martabat penegak hukum melalui rekayasa transaksi berbagai kasus hukum. Dimensi hukum merupakan unsur awal yang membuka ruang bagi rekonstruksi kesadaran dari degradasi dan katastrof politik gaya hidup yang lahir dari praktek manipulasi, eksploitasi dan instrumentalisasi politik demokratis. Dimensi hukum yang memuat nilai-nilai dan aturan legal formalistik demikian penting bagi rekonstruksi kesadaran rasional dan instrumental. Namun substansi dan esensi hukum dalam negara demokratis ini tidak sampai menyentuh ke dalam hakekat manusia itu sendiri. Ini didasarkan bahwa praktek hukum, demokrasi dan politik khususnya di Indonesia masih berpijak atas dimensi rasionalitas manusia. Dominasi rasionalitas pragmatis dan instrumentalis dalam kesadaran manusia Indonesia di bandingkan dengan rasionalitas nilai menjadi akar munculnya berbagai problem di atas.

Pencarian makna dalam kuasa terutama di dalam praktek politik gaya hidup tidak hanya berasal dari keberadaan agama (Islam) sebagai bagian unsur politik. Namun juga memuat nilai-nilai spiritual-transendental di balik kepongahan rasionalitas instrumental. Potret nilai-nilai tersebut masih menjadi fondasionalitas sebagian aktor politik di Indonesia baik di pusat maupun daerah. Urgensi nilai-nilai ini tidak hanya didasarkan atas potret kepalsuan kuasa berikut konsekwensinya namun juga dari proses historis dan biografis yang berintegrasi dalam struktur nalar dan kesadarannya. Potensi nilai-nilai spiritual-transendental dalam struktur hakekat manusia ini mampu melahirkan daya kritis bagi dekonstruksi dan rekonstruksi atas struktur kepalsuan globalisasi berupa politik gaya hidup dan berbagai derivasinya. Meski demikian, potensi nilai-nilai di atas masih belum menjadi kecenderungan massif dalam struktur politik demokratis bagi revolusi kekuasaan yang sejalan positif. Sebaliknya, potensi nilai-nilai tersebut justru mendominasi kondisi dalam mayoritas diam serta menimbulkan kenafian spiritual sebagaimana di atas.



Pencarian makna dalam kuasa dari nilai-nilai spiritual-transendental yang berintegrasi ke dalam wawasan atau visi agung politik ini memuat urgensi dan relevansi bagi transformasi kehidupan politik kontemporer. Transformasi politik tersebut dimulai dari penajaman makna atau hakekat politik ke dalam struktur nalar dan kesadaran manusia Indonesia. Politik tidak hanya sekedar sebagai permainan rasionalitas pragmatis dan instrumental di dalam labirin materialisme berikut praktek gaya hidup dan derivasinya menjadi horizon baru yang dapat melahirkan energi dan elan vital baru bagi kehidupan politik. Dominasi rasionalitas pragmatis dan instrumental dalam kerangka rasionalitas material menuntut dekonstruksi sekaligus rekonstruksi yang berpijak atas visi kemaslahatan kemanusiaan dalam kerangka negara hukum dan demokratis. Politik sebagai gaya hidup merupakan manifestasi ego pragmatis dan instrumental yang menuntut dekonstruksi melalui praktek diskursus rasional dan deliberatif yang berpijak atas nilai-nilai di atas. Rekonstruksi kesadaran reflektif dalam praktek dekonstruksi tentang kepalsuan politik gaya hidup demikian penting bagi rekonstruksi kesadaran spiritual dan transendental. Upaya ini merupakan langkah penting dalam membangun peradaban dan keadaban politik yang sejalan dengan nilai-nilai tradisionalitas Islam maupun Yunani kuno.

KESIMPULAN

Politik sebagai gaya hidup merupakan fenomena sekaligus realitas dalam globalisasi kontemporer yang di dalamnya menggambarkan pola integrasi antara ego pragmatis dan instrumental dalam struktur nalar atau kesadaran subyek dengan struktur globalisasi yang terdiri atas sistem demokrasi liberal, kapitalisme lanjut dan budaya posmodern di jagad fisik atau dunia real maupun transmudasi di dunia cyber-space atau jagad digital dan virtual. Potret politik sebagai gaya hidup di dalam lingkaran atau labirion eksistensial yang membias dan membaur di atas melampaui batas-batas konvensionalitas dan formalitas politik baik secara struktural maupun sosial-kultural dan keagamaan. Potret politik sebagai gaya hidup tidak hanya memuat praktek interaksi dan komunikasi serta media dan ruang publik yang bersifat formal dan konvensional namun menerjang batas-batas yang membaur dan membias dengan industri budaya dan media. Berbagai fenomena tersebut tentu melahirkan berbagai resiko dan konsekwensi dalam bingkai relasi rakyat dan negara berupa kepalsuan politik dan demokrasi itu sendiri. Sementara rakyat sebagai pemegang dan pemilik kedaulatan dengan berbagai kelemahan kualitas, kapasitas dan kapabilitas menjadi tumbal dan korban dalam praktek artifisialitas politik demokratis tersebut. Hidup dalam mayoritas diam merupakan alternatif meski memuat konsekwensi berupa kenaifan dalam berbagai bentuknya. Rekonstruksi dan resolusi politik sebagai gaya hidup di atas menuntut rekonstruksi kesadaran melalui dekonstruksi yang berpijak dari nilai-nilai spiritual-transendental baik dalam bingkai tradisionalitas Islam dan modernitas Islam maupun Barat.



BIBLIOGRAFI

- Ahmad, Nyarwi. *Manajemen Komunikasi Politik dan Marketing Politik: Sejarah, Perspektif dan Perkembangan Riset* (Yogyakarta: Pustaka Zaman, 2012).
- Althusser, Louis. *For Marx* (London: Penguin Books, 1969).
- Baudrillard, Jean. *In the Shadow of the Silent Majorities or the End of the Social and Other Essays*, terj. Paul Foss (New York: Columbia University Press, 1983).
- Brown, Wendy. "Power After Foucault" dalam John S. Dryzek, Bonnie Honig and Anne Phillips, ed, *The Oxford Handbook of Political Theory* (Oxford: Oxford University Press, 2006).
- Bulkin, Farchan. "Pokok-pokok Pikiran Mengenai Kelas Menengah" makalah yang disampaikan pada PAIS (Percakapan Ahli Ilmu-ilmu Sosial) di Fisip-Universitas Indonesia pada 3-4 Oktober 1984.
- Debord, Guy. *The Society of the Spectacle*, terj. Ken Knabb (Berkeley: Bureau of Public Secrets, 2014).
- Fidler, Roger. *Mediamorfosis: Memahami Media Baru*. Penj. Hartono H. (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2003).
- Fine, Ben. *The World of Consumption: The Material and Cultural Revisited* (New York and London: Routledge, 2002).
- Fukuyama, Francis. *Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy* (New York: Macmillan, tt).
- Habermas, Jurgen. *Teori Tindakan Komunikatif*, jilid 1. terj. Nurhadi. (Yogyakarta: Kreasi Wacana), 2007.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. "Civil Society: Pembangun dan Sekaligus Perusak Demokrasi" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, No. 1. Vol. 9. Tahun 2005.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. *Politics of NGO in Indonesia* (Routledge: Curzon Research on Southeast Asia;3, 2003).
- Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009).
- Hardiman, F. Budi. *Humanisme dan Sesudahnya: Meninjau Ulang Gagasan Besar Tentang Manusia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012).
- Hardiman, F. Budi. *Menuju Masyarakat Komunikatif* (Yogyakarta: Kanisius), 1993.
- Huntington, Sammuel P. *Political Order in Changing Societies* (New Haven: Yale University Press, 1968).
- Jensen, Mark. *Civil Society in Liberal Democracy* (New York: Routledge, 2011).
- John, Peter. *Local Governance in Western Europe* (London: Sage Publications, 2001).
- Kane, John. *The Politics of Moral Capital* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).
- Katembula, Lengwe. "Participation of NGO in Social Development Process in Africa" a paper presented in Colloquium at The School of Social Work, University of Zimbabwe, 4 August 1994.
- Liotard, Jean Francois. *The Postmodern Condition*. Trans. George Bennington and B. Massumi (Manchester: Manchester University Press, 1984),



- McKinnon, Andrew M. "Opium as Dialectics of Religion: Metaphor, Expression and Protest", dalam *Critical Sociology Journal*, No. ½. Vol. 31.
- Newberry, Paul. A. *Theories of Ethics* (London: Mayfield Publishing Co, 1999).
- Newman, Saul. *Power and Politics in Poststructuralist Thought: New Theories of the Political* (New York: Routledge, 2005).
- Osborn, Reuben. *Marxism and Psychoanalysis* (New York: Dell Publishing Co, 1965).
- Przeworski, Adam. *Sustainable Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).
- Sheuerman, William E.. *Frankfurt School Perspectives on Globalization, Democracy and the Law* (London and New York: Routledge, 2008).
- Shields, Rob. "Spaces for the Subject of Consumption" dalam Rob Shields, ed, *Lifestyle Shopping: The Subject of Consumption* (London and New York: Routledge, 1992).
- Sorensen, Georg. *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah*. Pent. I. Made Krisna (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Sufyanto, *Selebritisasi Politik: Kajian Dramaturgi, Habitus dan Tindakan Komunikatif Aktor Pemilu* (Bandung: Nusa Media, 2015).
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2010).
- Suseno, Franz Magnus. *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad Ke-19* (Yogyakarta: Kanisius, 1997).
- Sutikno, *Komunikasi Kritis: Rekonstruksi Demokrasi Politik di Indonesia* (Lamongan: Pustaka Ilalang, 2016).
- Sutikno, *Komunikasi Politik Ulama: Studi Dramaturgi Politik dalam Pilkada* (Surabaya: Tesis Master Komunikasi, Universitas Dokter Sutomo, 2009).
- Thiele, Leslie Paul. *Thinking Politics: Perspective in Ancient, Modern and Postmodern Political Theory* (New York: Seven Bridges Press, 2002).
- Wilhelm, Anthony G. *Democracy in the Digital Age: Challenges to Political Life in Cyberspace* (New York: Routledge, 2000).
- Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for A Human Future at the New Frontier of Power* (New York: Hachette Book Group, 2019).